

KETAHANAN PANGAN BERBASIS ADAT (TANTANGAN PENANGANAN COVID-19 DI BALI)

Komang Suarsana
Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra
Email: komsuar@gmail.com

ABSTRAK

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan pangan sangat meresahkan. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama. Oleh karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan terganggunya sistem kehidupan masyarakat maka masalah ketersediaan pangan bagi masyarakat semakin menjadi masalah yang besar. Hal ini tentunya menjadi ancaman serius terhadap masalah ketahanan pangan pada saat masyarakat terpapar wabah penyakit seperti Covid-19.

Dalam konteks ketahanan pangan, posisi dan peran desa adat di Bali sangat strategis. Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berhasil menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19, karena mendayagunakan potensi desa adat. Namun, belum berhasil mengatasi persoalan kebutuhan pangan dan fluktuasi harga pangan masyarakat secara optimal. Kondisi itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terlebih dengan rendahnya daya beli masyarakat akibat pandemi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam penanganan Covid-19 berbasis desa adat di Bali. Kondisi itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terlebih dengan rendahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan Covid-19 berbasis desa adat di Bali. Secara spesifik, upaya menjaga dan memperkuat ketahanan pangan berbasis desa adat di Bali dapat ditempuh melalui strategi jangka pendek dan jangka panjang, baik pada saat masih berlangsungnya pandemic maupun pasca-pandemi Covid-19.

Kata kunci: ketahanan pangan, Covid-19, desa adat

ABSTRACT

The impact of the Covid-19 pandemic on the economy and food was very disturbing. Food is the most basic human need. Therefore, the fulfillment of food is part of individual human rights. Fulfillment of food is also very important as a basic component to realize quality human resources. As the population increases and the disruption of the community's living system, the problem of food availability for the community is increasingly becoming a big problem. This is certainly a serious threat to the problem of food security when people are exposed to epidemics such as Covid-19.

In the context of food security, the position and role of “desaadat” (indigenous/traditional villages) in Bali is very strategic. Bali is one of the provinces in Indonesia that has succeeded in tackling and preventing the spread of Covid-19, because it exploits the potential of indigenous villages. However, it has not been able to overcome the problem of food needs and fluctuations in people's food prices optimally. This condition has the potential to cause new problems, especially with the people's low purchasing power due to the pandemic. This is a challenge in handling Covid-19 based on traditional villages in Bali. This condition has the potential to create new problems, especially with the low purchasing power of the people due to the Covid-19 pandemic

and is a challenge in handling Covid-19 based on indigenous villages in Bali. Specifically, efforts to maintain and strengthen food security based on customary villages in Bali can be pursued through short-term and long-term strategies, both during the pandemic and post-pandemic Covid-19 periods.

Keywords: *food security, Covid-19, indigenous villages*

1. Pendahuluan

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan pangan sangat meresahkan. Semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi melambat. Apalagi ditambah berbagai daerah sudah menuju ke arah kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), sehingga nantinya bias memicu berhentinya aktivitas ekonomi sebagai antisipasi merebaknya Covid-19. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dijangka pendek dan menengah akan mengalami perlambatan yang cukup tinggi juga.

Sementara terbatasnya akses masyarakat beraktifitas di luar mengakibatkan munculnya lonjakan permintaan akan kebutuhan pokok. Tak seimbang dengan kemampuan produksi pangan yang kondisinya begitu terbatas. Kebijakan pemerintah *Work from Home* (WFH) mulai dari bekerja, belajar, dan beribadah membuat masyarakat melakukan pembelian sembako secara massif sebagai upaya untuk memenuhi ketersediaan waktu mendatang.

Seberapa besar perlambatan ekonomi dan ketahanan pangan di Indonesia, hingga hari masih belum dapat dihitung secara pasti. Namun perlambatan aktifitas ekonomi sudah terasa, terutama di sector pariwisata, beberapa industri, perdagangan, transportasi dan investasi. Sektor-sektor tersebut bahkan banyak mengalami pemberhentian aktifitas ekonomi. Di sector pangan juga sudah mulai terasa dengan mulai tingginya harga-harga bahan pokok di pasaran.

Jika tidak diantisipasi segera mungkin, dampak yang mengenai sector riil bias

merembet ke sector perbankan dan ketahanan pangan. Tentu ini sangat mengkhawatirkan, mengingat Indonesia pernah mengalami krisis 1997-1998 di mana system perbankan ambruk akibat meningkatnya kredit bermasalah dan gejolak pasar keuangan. Sembako di masa itu juga mengalami lonjakan harga yang tajam sehingga melemahkan daya beli masyarakat. Lebih mengkhawatirkan lagi, pandemi Covid-19 bisa jauh lebih parah meluluhlantakkan system perbankan dan pangan, mengingat skalanya yang global.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama. Oleh karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pangan merupakan kebutuhan jasmani yang tak terelakkan, yang dalam istilah antropolog Melville J. Herkovitas, merupakan *the primary determinants of survival* bagi umat manusia.

Ketahanan pangan merupakan topik yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh banyak pihak sebagai konsekuensi dari dampak penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Setelah bergulat dengan masalah kesehatan dan daya beli masyarakat, pasokan pangan menjadi isu sentral lainnya yang perlu penanganan sesegera mungkin. Pangan harus menjadi perhatian karena urusan ini merupakan kebutuhan paling dasar, selain sandang, dan papan. Sejauh mana pemerintah mengantisipasi dampak Covid-19 ini terhadap ketahanan pangan? Tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemerintah dan pemerintah

daerah sebaiknya mengantisipasi dampak Covid-19 untuk menjaga ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta keterjangkauan (stabilitas) harga pangan mulai dari produksi hingga konsumsi, dari hulu hingga hilir.

2. Desa Adat dan Ketahanan Pangan

Pangan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama makanan pokok, karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya (Prabowo 2010). Menurut Khomsan et al. (2013), pangan tidak hanya sesuatu untuk dimakan namun juga bagian integral dari suatu masyarakat, daerah atau bangsa. Selain itu, system pangan masyarakat Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari system pertanian yang diadopsi oleh suku tertentu (Khomsan dan Wigna 2009). Sistem pertanian tersebut merupakan bentuk pengetahuan lokal yang dimiliki oleh suatu komunitas dan diterapkan secara turun-temurun.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, suatu desa bias dikatakan sebagai desa adat apabila memiliki pranata pemerintahan adat dengan perangkat norma hukum adat yang masih berlaku. Beberapa komunitas adat yang masih menerapkan hukum adatnya memiliki system pertanian tradisional yang masih mereka terapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Namun sayangnya, seringkali masyarakat adat dengan system pertanian dan berbagai kepercayaan yang mereka miliki dianggap tidak baik dan terbelakang sehingga keluar kebijakan dari pemerintah yang bersifat *top-down*. Adanya pergeseran paradigm dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern menyebabkan pemerintah membuat proyek “pemberdayaan” kepada mereka dengan “menggusur” tanah mereka dan menggeser identitas mereka (Rusli, 2012).

Desa adat di Bali tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah

memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan local *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara desaadat di Bali memiliki posisi strategis dalam mengatur masyarakatnya.

Dalam konteks ketahanan pangan, posisi dan peran itu sangat strategis. Sesuai Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, desa adat memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa adat. Beberapa di antaranya menyangkut pengelolaan hutan adat, sumber-sumber air, pantai dan laut, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, industry pangan dan kerajinan rakyat. Perda member amanat tentang wewenang desa adat diatur dalam *awig-awig*.

Awig-awig adalah suatu system aturan. Sistem itu secara adat mengatur para anggota masyarakat desa dalam mendapatkan distribusi dari hasil pendapatan tanah desa. Sistem ekonomi yang berkembang adalah system swadaya. Dalam system ini, masyarakat atau individu berusaha sendiri untuk mendapatkan kebutuhan hidupsehari-hari dengan mengembangkan berbagai sub system mata pencaharian seperti: bertani, buruh tani, berdagang dan sebagainya.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan terganggunya system kehidupan masyarakat maka masalah ketersediaan pangan bagi masyarakat semakin menjadi masalah yang besar. Hal ini tentunya menjadi ancaman serius terhadap masalah ketahanan pangan pada saat masyarakat terpapar wabah penyakit seperti Covid-19. Kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah dalam aplikasinya belum banyak mendukung pangan local sebagai pangan pokok melainkan berfokus pada pangan nasional

yang pada prakteknya tiap-tiap daerah berbeda.

Dalam UU No. 18 tahun 2012, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Selain itu, Bickel et al. (2000) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai akses oleh semua orang pada setiap waktu untuk memenuhi pangan demi hidup sehat dan aktif. Suryana (2003) menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu system ekonomi pangan yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem yang dimaksud yaitu ketersediaan pangan (*food availability*), akses pangan (*food access*) dan penyerapan pangan (*food utilization*) (Hanani 2012).

Hasil penelitian lain dilakukan oleh Wahid (2014), terdapat hubungan yang tidak dapat terpisahkan antara kearifan lokal dan ketahanan pangan. Hal ini disebabkan karena untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional basisnya adalah ketahanan pangan daerah dan ketahanan pangan daerah sendiri berbasis pada kearifan lokalnya (Wahid, 2014).

Ketahanan pangan menurut Kartasasmita dalam (Wahid, 2014) adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan pendapat dari Kartasasmita dan dibuktikan dengan pengamatan di lapangan, maka peran pemerintah, Majelis Desa Adat dan berbagai elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan dilihat dari aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, kecukupan, aksesibilitas dan keamanan pangan.

Desa adat di Bali memiliki pilar utama dalam konteks ketahanan pangan yakni *subak*. Perda Propinsi Bali No. 2 Tahun 1972 mendefinisikan subak sebagai masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio-agraris-religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus

sebagai organisasi pengusaha tanah dalam suatu daerah. Subak adalah organisasi tradisional di Bali yang didasarkan pada hukum adat, serta bersifat otonom untuk mengatur organisasinya, dalam suatu kelompok wilayah hamparan yang bersumber pada sumber air yang sama dengan batas yang jelas. (Budiasa, 2010).

Pertanian di Bali tidak terlepas dari keberadaan dan peran subak, baik yang menyangkut masalah pertanian di lahan sawah (subak lahan asah). Maupun pertanian di lahan tegalan/kering (subak abian). Subak lahan basah (sawah) di Bali identik dengan pertanian tanaman pangan, khususnya budidaya padi (Sutawan, 2009).

Pertanian, terlebih-lebih pertanian tanaman pangan berfungsi untuk memproduksi pangan untuk menjaga ketahanan pangan. Sangat disadari, bahwa tanpa pangan manusia tak mungkin bertahan hidup, sehingga patut diakui pula selama manusia membutuhkan pangan selama itu pula pertanian tetap penting. Oleh sebab itu, membahas keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Bali tidak terlepas dari peran subak, khususnya subak lahan basah, selama ini dan di masa yang akan datang.

Sudarta dan Dharma (2013) mengklasifikasikan fungsi subak menjadi fungsi internal dan eksternal sebagai berikut. Salah satu fungsi eksternal subak adalah sebagai penyangga atau pendukung ketahanan pangan. Sebagai penyangga dan pendukung ketahanan pangan, subak berfungsi sebagai pendukung ketahanan pangan, baik di tingkat keluarga atau rumah tangga serta daerah. Ketahanan pangan akan terancam apabila tidak ada subak dan sebaliknya apabila subak tetap lestari maka akan menjadi pendukung ketahanan pangan.

Pendayagunaan subak dan desa adat sebagai kearifan lokal Bali dalam memperkuat ketahanan pangan memiliki landasan yang kuat. Penelitian Perdana putra (2017) menemukan bahwa terdapat

hubungan positif antara kearifan local dengan ketahanan pangan. Semakin tinggi nilai kearifan local maka nilai ketahanan pangan juga akan semakin tinggi.

3. Ketahanan Pangan: Saat dan Pasca Pandemi Covid-19

Pendekatan sosial-budaya sangat ideal diterapkan dalam penanganan wabah penyakit. Berbagai catatan sejarah penanganan wabah di seluruh dunia memberikan informasi bahwa penanganan wabah penyakit tidak bias jika dilakukan dengan hanya melibatkan aspek medis. Hal ini dikarenakan wabah penyakit dan aspek sosial-budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, penyakit seringkali disebabkan oleh budaya (cara-cara hidup) manusia, atau setidaknya penyakit mudah menjadi wabah karena budaya tertentu dalam masyarakat. Di sisi lain penyakit memberikan dampak yang luar biasa dalam aspek budaya manusia.

Penyakit kolera misalnya, diketahui muncul dari budaya sanitasi yang buruk. Penyebaran kolera dimungkinkan karena pola hidup yang tidak bersih. Sebaliknya, sejak adanya wabah kolera masyarakat memiliki cara hidup baru, seperti penggunaan jamban dengan sistem *septic tank*. Demikian juga dengan wabah Covid-19 saat ini. Penyakit ini ditularkan antar-manusia melalui kontak jarak dekat. Oleh karena itu berbagai tradisi masyarakat seperti upacara adat dan pesta untuk sementara waktu tidak boleh dilaksanakan. Bukan tidak mungkin setelah wabah ini berakhir, manusia memiliki suatu cara hidup yang baru. Karena wabah terkait dengan sosial-budaya, maka penanganannya juga harus mempertimbangkan aspek sosial-budaya.

Sosiolog Inggris, Herbert Spencer pernah mengatakan bahwa untuk bertahan dalam kondisi yang berat atau kejam, manusia membutuhkan sikap egois untuk memungkinkannya bertahan hidup. Sikap inilah yang menjadi salah satu tantangan

penanganan Covid-19 berbasis adat. Meskipun pandangan Spencer ini banyak juga dibantah oleh filsuf lain yang berpendapat bahwa manusia bertahan hidup dengan azas altruisme (mengutamakan kepentingan bersama), namun, dengan kondisi asyarakat yang sangat kapitalistik saat ini, di mana hak kepemilikan pribadi sangat besar, pendapat Spencer lebih mungkin terjadi.

Dalam konteks Bali, antisipasi terhadap pandangan Spencer sesungguhnya telah dilakukan. Bali telah menjadi contoh daerah yang berhasil menangani Covid-19 dengan pendekatan social budaya dan adat. Pemerintah Provinsi Bali membentuk Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat dalam penanggulangan pandemi virus corona. Pelibatan desa adat ini dituangkan dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-ProvBali/III/2020 ini ditetapkan tanggal 28 Maret 2020.

Dalam Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat ini, 1.495 desa adat di Bali yang tersebar di 9 kabupaten/kota se-Bali terlibat penuh membantu pemerintah daerah menanggulangi dan mencegah penyebaran virus Corona. Satgas juga berada di garda terdepan membangun gotong royong sesama krama desa adat. Hal ini dilakukan antara lain dengan mendata krama desa adat yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok dan menghimpun kebutuhan dasar pokok dari krama desa adat yang mampu untuk bergotong royong dan mendistribusikan kepada krama desa adat yang terdampak Covid-19 guna meringankan beban hidupnya.

Alhasil, gerakan Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat berhasil menekan laju penyebaran Covid-19 antara lain melalui pengendalian pergerakan masyarakat dan mengatur masyarakat agar tertib secara interaksi social guna menahan laju

penyebaran Covid-19. Satgas juga berhasil mendata, menghimpun dan mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat. Namun, secara umum, Pemprov Bali dan MDA maupun Satgas belum berhasil mengatasi persoalan kebutuhan pangan dan fluktuasi harga pangan masyarakat secara optimal. Kondisi itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terlebih dengan rendahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam penanganan Covid-19 berbasis desa adat di Bali.

Pangan mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama makanan pokok, karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Beras adalah bahan pangan pokok utama (sembako) sebagian besar masyarakat. Disusul kemudian oleh kebutuhan pokok lainnya yakni *gula* pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium. Oleh karena itu masalah ketahanan pangan di Indonesia menjadi penting untuk mencegah dampak terhadap kestabilan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan. (Prabowo, 2010)

Untuk mengantisipasi hal ini terjadi dapat membuat sejumlah kebijakan dengan menjadikan kebudayaan dan kearifan local seperti desa adat sebagai ujung tombak. Mengingat bahwa pandemic melumpuhkan sector ekonomi, maka perlu dipikirkan suatu system pengaman dan ketahanan pangan. Paling tidak, ada skema yang menjamin bahwa kecukupan pangan bagi masyarakat kelas bawah semasa pandemic akan terpenuhi. Bukan sekadar membagikan sembako yang distribusinya juga belum berkeadilan.

Pemerintah Provinsi Bali dapat memfasilitasi desa adat membentuk Tim Lumbung Pangan yang bertugas mengumpulkan sumbangan atau iuran bahan pangan yang akan didistribusikan kembali kepada masyarakat saat kelangkaan bahan

pangan terjadi pada masa wabah. Jika skema ini dikelola dengan baik, ketahanan pangan pada masa pandemic akan terjaga, dan ini akan berbanding lurus dengan pencegahan tindak criminal serta permasalahan sosial. Selain membentuk Tim Lumbung Pangan, pilar utama desa adat yakni subak juga harus dioptimalkan perannya sebagai penyangga utama ketahanan pangan.

Secara spesifik, upaya menjaga dan memperkuat ketahanan pangan berbasis desa adat di Bali dapat ditempuh melalui strategi jangka pendek dan jangka panjang, baik pada saat masih berlangsungnya pandemic maupun pasca-pandemi Covid-19.

Selain memberikan sembako atau sosial non-tunai yang dibeli dari petani lokal dan toko-toko sekitar, dalam jangka pendek ada beberapa strategi yang bias dilakukan. Pertama, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia petani dan calon petani untuk melakukan kegiatan *urban farming* (pertanian perkotaan/non-lahan pertanian), penyediaan sarana produksi *urban farming*, dan penerapan teknologi pengolahan produk-produk pertanian sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua, membangun suasana adaptasi Covid 19 pada petani dan calon petani melalui inovasi dan kreativitas serta jiwa kewirausahaan serta aplikasi digitalisasi termasuk *online marketing*. Ketiga, menyediakan lahan-lahan kosong (milik privat dan pemerintah) untuk dapat dikelola.

Strategi pemulihan ekonomi jangka panjang dapat berupa pembangunan pertanian dalam arti luas dan berbasis SDM untuk aplikasi teknologi. Pembangunan pertanian Bali dalam arti luas harus berbasis sumber daya manusia (SDM). Tidak ada yang dapat dilakukan jika memiliki teknologi pertanian dari hulu sampai ke hilir, tetapi pelaku atau mereka yang mengoperasikan teknologi tersebut tidak memiliki kualitas SDM yang memadai untuk menggunakan teknologi yang tersedia. Sementara teknologi adalah salah satu alatu ntuk mencapai tujuan.

Penguatan kapasitas dan kualitas SDM pertanian akan mampu mengelola usaha taninya dengan menggunakan teknologi (*good agricultural practices, good postharvest practices, dan good manufacturing practices*), untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan produk yang lebih berkualitas, dan berdaya saing, selain teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta digitalisasi pertanian.

Seiring dengan peningkatan kualitas SDM ini, menurut Sedana (2020), strategi untuk jangka panjang juga adalah membangun pertanian yang inklusif berorientasi agribisnis, di mana seluruh aktor pasar yang terlibat di dalam *supply chain* (rantai pasok) harus saling berbagai peran dan fungsi dan didasarkan pada model bisnis yang saling disepakati, bukan atas dasar *charity* (amal). Melalui pertanian inklusif ini akan diharapkan masing-masing aktor pasar memperoleh insentif ekonomis sesuai dengan peran dan fungsinya.

4. Penutup

Ketahanan pangan merupakan topik yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh banyak pihak sebagai konsekuensi dari dampak penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Setelah bergulat dengan masalah kesehatan dan daya beli masyarakat, pasokan pangan menjadi isu sentral lainnya yang perlu penanganan sesegera mungkin. Pangan harus menjadi perhatian karena urusan ini merupakan kebutuhan paling dasar, selain sandang, dan papan.

Dalam konteks ketahanan pangan, posisi dan peran desa adat di Bali sangat strategis. Desa adat memiliki pilar utama dalam menyangga ketahanan pangan yakni *subak*. Sebagai penyangga dan pendukung ketahanan pangan, *subak* berfungsi sebagai pendukung ketahanan pangan, baik di tingkat keluarga atau rumah tangga serta daerah. Ketahanan pangan akan terancam apabila tidak ada *subak* dan sebaliknya apabila *subak* tetap lestari maka akan menjadi pendukung

ketahanan pangan. Pendayagunaan *subak* dan desa adat sebagai kearifan lokal Bali dalam memperkuat ketahanan pangan memiliki landasan yang kuat. Terdapat hubungan positif antara kearifan lokal dengan ketahanan pangan. Semakin tinggi nilai kearifan lokal maka nilai ketahanan pangan juga akan semakin tinggi.

Secara umum, Pemprov Bali dan MDA maupun Satgas belum berhasil mengatasi persoalan kebutuhan pangan dan fluktuasi harga pangan masyarakat secara optimal. Hal itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terlebih dengan rendahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam penanganan Covid-19 berbasis desa adat di Bali. Kondisi itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terlebih dengan rendahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam penanganan Covid-19 berbasis desa adat di Bali.

Secara spesifik, upaya menjaga dan memperkuat ketahanan pangan berbasis desa adat di Bali dapat ditempuh melalui strategi jangka pendek dan jangka panjang, baik pada saat masih berlangsungnya pandemic maupun pasca-pandemi Covid-19.

Daftar Acuan

- Bickel, G, Nord M, Price C, Hamilton W, Cook J. (2000). Guide to Measuring Household Food Security https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/FS_Guide.pdf, diakses pada tanggal 14 Juli 2020
- Budiasa, I W. (2010). Peran Ganda Subak untuk Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Bali. Jurnal AGRISEP Vol. 9 No. 2, September 2010.
- Hanani N. (2012). Strategi Pencapaian Ketahanan Pangan Keluarga. Jurnal Agriculture Economics.
- Koentjaraningrat. (1981). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : RinekaCipta.

- Perdanaputra, F. (2017). Ketahanan Pangan di Kampung Adat dan Non-kampung Adat. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Khomsan A, Riyadi H, Marliyati SA. (2013). Ketahanan Pangan dan Gizi serta Mekanisme Bertahan pada Masyarakat Tradisional Suku Ciptagelar di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*.
- Polanyi, Karl. (1944). *The Great Transformation: The Political and Social Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press. Wibowo Priyanto, dkk. 2009. Yang Terlupakan Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda. Depok: Kerjasama Departemen Sejarah UI dengan Unicef Jakarta di dengan Unicef Jakarta dan Komnas FBPI.
- Prabowo R. (2010). Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Mediagro*. Vol. 6(2):
- Rusli M. (2012). Kearifan Lokal Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenren Rappang. *Jurnal Al-Ulum*.
- Sedana, I G. (2020). Membangun Pertanian Inklusif. Makalah pada Webinar “Strategi Pembangunan Ekonomi Bali Pasca-Pandemi Covid-19”. DPD Partai Golkar Provinsi Bali di Denpasar, Selasa, 9 Juni 2020.
- Sudarta, Wayan dan I Putu Dharma. (2013). Memperkuat Subak Anggabaya dari Segi Kelembagaan. Laporan Pengabdian Masyarakat. Kerjasama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan Program Ekstensi Fakultas Pertanian UNUD.
- Suryana A. (2003). Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan. Yogyakarta [ID]: Badan Penerbit Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. 317 hal.
- Sutawan, N., M. Swara, W. Windia, dan W. Sudana. (1989). Laporan Akhir Pilot Proyek Pengembangan Sistem Irigasi yang Menggabungkan Beberapa Empelan Subak di Kab. Tabanan dan Kab. Buleleng, Kerjasama DPU Prop. Bali dan Univ. Udayana, Denpasar.
- Wahid, M. A. (2014). Kearifan Lokal (Local Wisdom) dan Ketahanan Pangan. Skripsi. Universitas Padjajaran.